

Judul : Pengusiran mencoreng muruah parlemen
Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pengusiran Mencoreng Muruah Parlemen

Seharusnya ada regulasi yang lebih kuat untuk menghukum pihak yang dengan sadar dan sengaja menginjak-injak kehormatan DPR.

TRI SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

KETUA Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Andy Yentriyani mengatakan pengusiran pihaknya dari ruang sidang oleh pimpinan rapat Komisi III DPR Desmond Mahesa pada Januari lalu hanya miskomunikasi. Komnas Perempuan sebenarnya mengikuti sidang secara hibrida. Namun, kehadiran langsung ke ruang rapat dinilai lebih baik ketimbang virtual.

Andy mengakui telah menginfokan ke sekretariat DPR akan keterlambatan pihaknya hadir dalam ruang rapat. Ia berasumsi pimpinan sidang telah terinfokan mengenai keterlambatan tersebut.

"Sayangnya, ketua sidang pada saat itu tidak menerima penjelasan yang coba kami sampaikan," aku Andy kepada *Media Indonesia*, Minggu (20/2).

Komnas Perempuan sudah bersurat ke Komisi III mengenai permintaan ruang diskusi yang terpisah dengan Komnas HAM. Saat itu, isu yang akan dibahas mengenai kasus kekerasan seksual dan konflik sumber daya alam yang berkaitan dengan kondisi perempuan.

Lebih lanjut, Komnas Perempuan juga berharap pengusiran oleh DPR tidak menjadi batu sandungan berkelanjutan, tetapi penguatan komunikasi kelembagaan yang lebih konstruktif untuk kepentingan perempuan, khususnya

korban kekerasan dan diskriminasi.

Di tempat terpisah, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangli Syarwi Chaniago mengatakan pengusiran perwakilan mitra strategis di DPR RI berpengaruh pada muruah dewan. Menurutnya, perlu alasan yang logis dan terukur ketika pimpinan komisi di dewan mengusir mitra kerja DPR dari ruang rapat.

"Sangat disayangkan kalau pengusiran tanpa ukuran atau indikator yang tidak jelas. Apalagi dilakukan secara sepihak," ujar Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu, Sabtu (19/2).

Menurut Pangli, harus ada alasan rasional yang bisa dijelaskan pimpinan dewan sehingga DPR terlihat sebagai lembaga yang angkuh dan jemawa yang mudah mengusir mitra strategis.

Namun, ia menduga kekesalan pimpinan komisi melakukan pengusiran jajaran kementerian atau pimpinan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga disebabkan alasan lain.

Pada awal 2022, pengusiran oleh DPR terhadap mitra strategis terjadi beberapa kali. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim diusir pimpinan Komisi VII karena perdebatan sengit yang terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP). Senin (14/2).

Tegas

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

menegaskan tindakan sejumlah pimpinan Komisi DPR RI yang mengusir mitra kerja dari rapat ialah langkah yang tepat. Wakil Ketua MKD Habiburokman melihat para mitra yang dikeluarkan memang tidak memiliki etika dalam bersidang dan cenderung merendahkan parlemen sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

"Ini bukan persoalan ego. Ini adalah persoalan bagaimana kita menghormati aturan. Kewenangan DPR itu kan bukan untuk pribadi pimpinan atau anggota, melainkan untuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat," ujar Habiburokman kepada *Media Indonesia*, Minggu (20/2).

Dari tiga aksi pengusiran terhadap mitra kerja, ia mengungkapkan Silmy sama sekali tidak menghormati Wakil Ketua Komisi VII sebagai pimpinan sidang. Sanksi kepada Silmy, lanjutnya, terlalu lemah. Seharusnya ada regulasi yang jauh lebih kuat untuk menghukum pihak-pihak yang dengan sadar dan sengaja menginjak-injak kehormatan DPR sebagai wakil rakyat.

"Jika sudah dalam konteks menghina parlemen, perlu ada aturan pidana. Kalau dalam bersidang saja tidak ada etika, bagaimana ketika bertugas di lapangan. Dia merasa kuat, merasa ditunjuk oleh orang kuat sehingga menganggap rakyat dan DPR bukan apa-apa," tegas Habiburokman. (Ind/Pra/P-5)

Sederet Insiden Pengusiran dalam Rapat DPR

27 Mei 2010

- Menteri Kesehatan Endang Sri Rahayu Sedyaningsih diusir anggota Komisi IX DPR karena mengeluarkan Permen tentang Jaminan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis di Daerah yang dinilai bertentangan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh anggota DPR.

9 Desember 2010

- Direktur Utama PT Pertamina (persero) Karen Agustiawan dan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono diminta keluar dari rapat di Komisi VII DPR karena DPR hanya mengundang Menteri ESDM dan jajarannya.

16 Februari 2012

- Direktur Utama PT Jasa Raharja (persero) Diding S Anwar dikeluarkan dari rapat Komisi XI DPR karena dianggap tidak membawa data lengkap untuk pemaparan.

Maret 2012

- Dirut PT PLN (persero) Nur Pamudji dikeluarkan dari rapat di Komisi VII DPR karena anggota Komisi VII tidak setuju dengan kehadirannya.

2 Maret 2013

- Direktur Utama PT RNI (persero) Ismed Hasan Putro diusir di Komisi VI DPR karena anggota dewan dituding berupaya memalak perusahaan tersebut.
- Isu "pemalakan" mencuat saat Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan ada permintaan anggota dewan kepada direktur-direksi BUMN.

26 Maret 2013

- Direktur Utama PT Garanti (persero) Yulian Lintang diusir di Komisi VI karena pemilihannya dianggap tidak legal tanpa pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS).
- Ia dianggap tidak berhak memberikan tanggapan dalam rapat.

30 Juni 2020

- Direktur Utama holding tambang BUMN Mining Industry Indonesia (Mind Id) atau PT Inalum (persero) Orlas Petrus Moedak diusir di Komisi VII DPR karena berdebat sengit dengan salah satu anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir.

12 Januari 2022

- Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani diusir Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa karena alasan terlambat hadir di rapat.

19 Januari 2022

- Sekjen Kementerian Sosial Harry Hikmat diusir pemimpin Komisi VIII DPR Ace Hasan yang tersinggung dengan ucapan Harry di grup *Whatsapp*.

14 Februari 2022

- Direktur PT Krakatau Steel Silmy Karim diusir saat rapat dengan Komisi VII yang dipimpin Bambang Haryadi.

Tanggapan Mahkamah Kehormatan Dewan

- Pengusiran mitra kerja dari rapat merupakan langkah yang tepat.
- Para mitra yang dikeluarkan tidak memiliki etika dalam bersidang.
- Para mitra cenderung merendahkan parlemen sebagai salah satu lembaga tinggi negara.



Sumber: DPR RI/Tim M&U/Berang M&U/ Grafik: SEND

Kalau tidak Tertib Dipersilakan Keluar

KRONOLOGI pengusiran Direktur Krakatau Steel Silmy Karim yang terjadi di Rapat Komisi VII sebetulnya seperti apa?

Pada rapat itu, kami ini ada ketuntuan, yakni tatib yang ada di awal. Saya sebagai pimpinan bertanggung jawab terhadap jalannya sidang. Waktu terjadi perdebatan itu di permulaan sidang. Ketika paparan, seharusnya saya lempar ke anggota, tapi yang bersangkutan beberapa kali menyela. Saya sudah ingatkan sebentar Pak Dirut agar tertib mekanisme persidangan. Ini kan bukan ruang debat kusir. Kami harap mitra bisa menjaga aturan-aturan yang ada di DPR.

Apakah anggota Dewan berhak melakukan pengusiran mitra kerja?

Bagaimanapun harus mengikuti mekanisme tuan rumah. Memang harus tertib. Kalau tidak tertib, kami persilakan keluar. Kami di dalam sidang selalu membacakan bahwa persidangan ini sudah harus memenuhi kuorum. Itu semua ada di tatib dan pasal-pasal terkait dengan ketentuan persidangan. Mitra ini bukan mitra baru. Pak Silmy saya pikir beliau sangat paham teknis persidangan. Menurut saya, ini hanya bentuk tanggapan yang reaktif terhadap beberapa pertanyaan yang sebenarnya

kami sudah kumpulkan sejak lama.

Bagaimana kelanjutan hubungan DPR dengan mitra kerjanya, terutama yang mendapatkan pengusiran? Apakah substansi rapat bisa tercapai?

Kami akan lakukan pendalaman di panja pengawasan impor bahan baku industri karena haja salah satu sektor yang kami awasi. Maraknya impor yang luar biasa, kami kemarin kenapa begitu ingin mencecar karena ada satu sisi yang berbeda dengan yang lain. Beliau

sampaikan Krakatau Steel untung, padahal di industrinya ada dua bahasan. Pertama, *blast furnace* yang dihentikan, kedua mangkraknya smelter di Kalimantan Selatan.

Akibat pengusiran mitra kerja, citra DPR dipandang buruk bahkan disebut 'Dewan Pengusir Rakyat', tanggapan Anda bagaimana?

Kami ingin menjelaskan kadang kami itu lebih banyak dinilai negatif. Buat kami itu koreksi. Namun, perlu diketahui publik bahwa selama ini kami DPR sering memanggil mitra dalam rangka pekerjaan. Kami panggil mitra banyak sekali alasan kadang ditunda. Kami kan harus menjalankan hak konstitusional fungsi pengawasan terhadap mitra kerja.

Catatan apa yang ingin disampaikan kepada mitra kerja yang akan mengikuti rapat dengan dewan?

Saya harap mitra untuk mengingatkan mitra bahwa kami ini menjalankan tugas konstitusi. Jangan sampai kami dibilang DPR tidak bekerja. Kami diberikan mandat dalam UU tugas pengawasan, legislasi, dan anggaran. Kami ingin meningkatkan kinerja kami. Kami ingin mitra hormati hak-hak kami juga. (Uta/P-5)



Bambang Haryadi
Wakil Ketua Komisi VII

Citra Galak Tutupi Kelemahan

BAGAIMANA tanggapan Formappi mengenai fenomena pengusiran mitra kerja DPR dari ruang rapat?

DPR periode ini kerap dianggap hanya menjadi stempel pemerintah. Dengan terlihat galak kepada mitra kerja, DPR seolah-olah mau membuktikan bahwa mereka tegas kepada pemerintah. Dengan demikian, pengusiran ini tampak seperti sinetron saja. Menampilkan citra galak untuk menutupi kelemahan.

Jika ini urusannya untuk menunjukkan kuasa DPR dalam menggertak, cara yang digunakan dengan mengusir mitra kerja justru tak banyak membantu pengelabuan DPR. Mereka malah terlihat arogan, kasar, tak punya sopan santun. Itu semakin memperburuk citra DPR.

Dari tiga kasus terakhir, apakah Formappi menilai para pimpinan rapat layak mengeluarkan mitra tersebut dari ruang rapat?

Saya kira tak satu pun dari pengusiran yang dilakukan pimpinan sidang bisa dibenarkan. Pengusiran tak punya dasar dalam aturan mana pun di DPR. Yang ada di aturan ialah DPR harus profesional berhubungan dengan mitra kerja. Ketika pengusiran yang dilakukan, terlihat betul rendahnya kualitas etik pada

pimpinan yang mengusir mitra kerja itu. Jika ada sesuatu yang tak menyenangkan ditunjukkan mitra kerja, selalu terbuka jalan untuk dialog.

Di sisi lain, apakah para mitra DPR yang diusir telah melakukan *contempt of parliament*?

Tuduhan DPR bahwa mitra kerja melakukan *contempt of parliament* terlalu berlebihan. Hanya masalah miskomunikasi saja kok dibilang *contempt of parliament*. Tuduhan *contempt of parliament* lebih mengekspresikan cara DPR untuk

membenarkan tindakan mereka. Seolah-olah selama ini DPR sudah memuliakan parlemen saja. Yang menghina DPR justru lebih sering ialah DPR sendiri yang masih korup, malas bekerja, manut pada pemerintah, bukan pada rakyat.

Seperti apa dampak pengusiran para mitra terhadap kinerja DPR?

Dampak pengusiran yang dilakukan DPR paling utama ialah ketakutan, keengganan dari mitra kerja. Jika mitra sudah diliputi ketakutan, relasi menjadi tidak tulus dan cenderung tertutup. Di samping itu, pengusiran juga akan membuang kesempatan DPR untuk menjalankan kontrol yang cepat dan tepat. Pengusiran juga membuat agenda rapat dengan mitra yang diusir harus dijadwal ulang sehingga tidak efektif dan efisien. Ujung-ujungnya kinerja DPR yang dirugikan.

Bagaimana pola komunikasi yang seharusnya dibangun DPR terhadap mitranya?

Pola komunikasi yang ideal dengan mitra kerja harus saling menghormati. Peran pengawasan tidak untuk mengintimidasi, tetapi mencari solusi bersama demi memperbaiki kebijakan mitra kerja. (Tri/P-5)



Lucius Karus
Peneliti Formappi